

7-31-2015

Ketika Pers Bicara Korupsi: Analisis Tajuk Rencana Harian Pedoman pada Awal Orde Baru 1969 – 1974

Aditia Muara Padiatra
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/paradigma>



Part of the [Archaeological Anthropology Commons](#), [Art and Design Commons](#), [Fine Arts Commons](#), [History Commons](#), [Library and Information Science Commons](#), [Linguistics Commons](#), and the [Philosophy Commons](#)

Recommended Citation

Padiatra, Aditia M. 2015. Ketika Pers Bicara Korupsi: Analisis Tajuk Rencana Harian Pedoman pada Awal Orde Baru 1969 – 1974. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 5, no. 2 (July). <http://dx.doi.org/10.17510/paradigma.v5i2.51>.

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KETIKA PERS BICARA KORUPSI: ANALISIS TAJUK RENCANA HARIAN PEDOMAN PADA AWAL ORDE BARU 1969 – 1974

Aditia Muara Padiatra

Abstract

This article discusses the role of the press in uncovering cases of corruption, using the editorial of Pedoman daily newspaper in the early years of the New Order period 1969-1974. The newspaper was eventually prohibited to publish because of its stand to oppose the authoritarian Soekarno government. At the time of president Soeharto's New Order, the newspaper was allowed to run again, but was officially banned in January 1974 because of the publication of the students' demonstration in the Malari or Malapetaka Lima Belas Januari opposing the government welcoming the Japanese companies operating in Indonesia. At both the Soekarno and Soeharto governments, Rosihan Anwar was the chief editor of Pedoman. The content analysis will also refer to Indonesia Raya newspaper, which like Pedoman, was suppressed not to criticize the government. The newspaper was no longer free to express its opinion after the graft case in three key offices, Bulog (the National Logistics Agency), Pertamina (the state-owned national oil company), Bea Cukai (the Directorate General of Customs and Excise), and the police force, were exposed. The press was finally co-opted with the government rules.

Keywords

press; Pedoman; editorial

Abstrak

Artikel ini membahas peranan pers mengungkapkan kasus korupsi yang dimuat di harian Pedoman pada masa awal Orde Baru pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1974. Pedoman telah beredar pada masa Order Lama, dan pada saat itulah dilarang terbit karena menentang pemerintahan Soekarno yang otoriter. Pada masa Orde Baru Presiden Soeharto, surat kabar ini diijinkan terbit, namun pada Januari 1974 kembali dilarang beredar karena memuat demonstrasi mahasiswa pada peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) menentang pemerintah membuka ijin perusahaan Jepang di Indonesia. Pada kedua pemerintahan Soekarno dan Soeharto, Rosihan Anwar menjabat sebagai editor surat kabar Pedoman. Analisis isi dalam tulisan ini akan merujuk pada harian Indonesia Raya yang seperti Pedoman, ditekan oleh pemerintah untuk tidak mengeritik. Surat kabar tidak bebas mengeluarkan pendapatnya, setelah kasus korupsi di tiga kantor utama pemerintah, Bulog, Pertamina, Bea Cukai, dan Kepolisian dibebaskan. Pers akhirnya harus mengikuti aturan pemerintah dalam pemberitaan.

Kata kunci

pers; Pedoman; editorial

PENGANTAR

Sebagai media informasi, peranan pers tentunya tidak terlepas dengan kondisi sosial-politik-ekonomi pada masa pers itu berada. Dalam konteks Negara Indonesia, dinamika seperti pergeseran format dan kasus-kasus yang ada dari masa ke masa cukup memberi pengaruh kehidupan pers dan media massa, khususnya media cetak yang ada pada saat itu. Pada masa awal Orde Baru sendiri, kasus-kasus yang diangkat oleh pers berkisar pada tema yang utamanya berkaitan dengan korupsi.

Sebagai media informasi, Harian *Pedoman*¹ yang lahir kembali pada periode kedua pada masa awal Orde Baru (setelah sebelumnya sempat dibredel) sempat mengalami kondisi dalam suasana bersemi dengan mengangkat slogan “Kebebasan Pers”, walaupun pada akhirnya kembali dibredel pada peristiwa Malari² pada awal Januari 1974 akibat bersikap kritis terhadap berbagai gejala penyakit, yang utamanya korupsi terhadap pemerintahannya sendiri.

ORDE BARU DAN KONSOLIDASI KEKUASAAN

Orde Baru lahir pada tanggal 12 Maret 1967 ketika Jenderal Soeharto menjabat secara resmi setelah diambil sumpahnya sebagai pejabat presiden, Setelah dikukuhkan dan resmi menjadi presiden penuh Republik Indonesia pada bulan Maret 1968, Jenderal Soeharto kemudian dihadapkan oleh beberapa persoalan penting yang pada saat itu menghinggapinya masyarakat Indonesia, terutama stabilitas yang begitu rapuh warisan setelah runtuhnya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno.

Ia dihadapkan sebuah pertanyaan besar bagaimana membuat suatu usaha format politik baru yang tentunya akan menjadi sebuah mekanisme yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia yang stabil dan sejahtera.³ Format politik baru itu disatu sisi harus mampu memberikan kepuasan kepada unsur-unsur pendukung Orde

¹ Sekilas mengenai Pedoman, harian ini merupakan salah satu harian republik yang muncul pada masa kemerdekaan, Harian ini lahir atas usaha kerjasama Rosihan Anwar dengan pemilik modal dari harian Pemandangan yang bernama R.H.O Djunaedi, yang memulai masa terbit untuk pertama kali pada tanggal 29 November 1948. Harian ini dinakhodai oleh Rosihan Anwar dan cukup mewarnai sejarah pers yang ada di Indonesia, terutama pada dua periode harian ini terbit yakni pada masa kekuasaan Soekarno (1948-1961) dan masa awal Orde Baru (1968-1974).

² Peristiwa Malari, atau yang lebih dikenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa terkait dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka ke Indonesia. Untuk lebih mengetahui mengenai peristiwa malari ini, lihat Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES, 1988, Hal. 90, Akhmad Zaini Abar. *1966-1974 : Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta : Lkis Hal. 163. Di sisi lain, untuk melihat versi pemerintah dalam menelaah hal ini lihat, Marzuki Arifin. *Fakta Analisa Lengkap dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Publishing House Indonesia. 1974.

³ Di bidang keamanan ia harus bersiap bila komunis menyerang kembali; sedangkan di bidang politik ia ingin membangun kekuatan baru, dengan menggandeng tentara, asalnya. Di bidang ekonomi ia tidak ingin mengabaikan, justru inilah yang membedakannya dengan pendahulunya, ia menjadikan ekonomi sebagai panglima. Untuk lebih jelasnya Lihat Harold Crouch. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986. Hal. 377.

Baru yang pada saat itu tentu saja sangat beraneka ragam, dan disisi lain juga harus mampu melihat sejarah, dengan menjauh dari kesulitan-kesulitan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Semua itu tidak dipungkiri menjadi titik tolak atau indikator untuk menciptakan sebuah kondisi yang mampu menghasilkan ketenangan dan kestabilan didalam masyarakat.⁴

Konsepsi politik Jenderal Soeharto pada saat itu tampak jelas berusaha memperbaiki dan menghilangkan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi pada masa sebelumnya (masa Demokrasi Terpimpin). Donald Hindley dalam artikelnya menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang nampak mendukung pada saat Jenderal Soeharto menjalankan kekuasaannya tersebut:

“ ... Dalam istilah yang luas, kekuasaan Jenderal Soeharto berdiri pada setidaknya enam faktor. Pertama, kontrolnya terhadap angkatan bersenjata, yang terus meningkat sejak peristiwa Oktober 1965. Kedua, pembubaran fisik PKI, Partai Komunis Indonesia, yang selesai pada tahun 1968. Ketiga, kadar ketaatan birokrasi sipil yang mulai menyeluruh. Keempat, kekacauan-kekacauan internal yang ada di banyak partai politik. Kelima, kepatuhan tradisional dari banyak golongan kelas bawah. Dan keenam, kesuksesan pemerintah dalam bidang ekonomi ... ”⁵

Pada titik ini, Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat pada saat itu tentunya melihat beberapa hal yang perlu dirinya lakukan untuk mengukuhkan Orde yang baru saja lahir tersebut. Hal yang kemudian pertama Ia terapkan adalah dengan melakukan konsolidasi awal dari tahapan Orde Baru, yakni dengan merangkul beberapa unsur yang sebelumnya ditekan dan diperlakukan secara represif pada masa Demokrasi Terpimpin dibawah pemerintahan Nasakom Soekarno.

Hal ini tentunya memberikan angin segar terhadap beberapa unsur oposisi yang sebelumnya berjuang bersama dalam menumbangkan Era Pemerintahan Soekarno pada saat itu. Salah satu unsur yang mendapat keuntungan dalam hal ini adalah Pers. Pada masa awal Orde Baru, pers diberikan kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya terutama pada kasus-kasus korupsi yang nantinya kian marak, sehingga periode ini juga dikenal sebagai masa “kebebasan” bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pada masa awal, perbedaan ini amat terasa, karena pada masa Demokrasi Terpimpin, isu korupsi hampir tenggelam seiring dengan gelora revolusi yang disuarakan oleh Soekarno. Pada kondisi ini bukan berarti korupsi tidak ada pada masa tersebut. Gejala inflasi yang tinggi, dominasi militer dalam bisnis dan ekonomi negara,

⁴ Untuk lebih jelas mengenai hal ini lihat Harold Crouch. *Op.Cit*, Sinar Harapan, 1986, lihat juga Herbert Feith. “Soeharto Search for a Political Format”, Indonesia. No. 6 (Oct 1968), *South East Asia Program Publication of Cornell University*. Hal. 88-105 di unduh dari www.jstor.org/stable/3350713 tanggal 01/03/2012 Jam 22:59.

⁵ Donald Hindley. Indonesia 1971: “Pantjasila Democracy and The Second Parliamentary Elections” Vol. 12, No. 1. *A Survey of Asia in 1971: Part 1* (Jan, 1972), Hal. 56-68. Di unduh dari [//www.jstor.org/stable/2642920](http://www.jstor.org/stable/2642920) tanggal 20/05/2011 Jam 11:36.

serta peranan Soekarno yang mencampuri urusan ekonomi, menjadi peluang munculnya korupsi. Selain itu, kondisi pers yang mendapat tekanan dalam menyuarakan isu korupsi dan penyimpangan telah memburamkan gambaran mengenai korupsi pada masa Demokrasi Terpimpin.⁶

Kondisi ini kemudian mengalami perubahan pada masa awal Orde Baru, pers masa awal Orde Baru sendiri memiliki model pers yang populis dan kritis.⁷ Model tersebut dimungkinkan dengan situasi pada awal Orde Baru yang pada waktu itu mendukung keleluasaan pemberitaan dan kebebasan pers. Hal ini merupakan akibat dari tumbangannya rezim kekuasaan Soekarno yang pada saat itu sangat ketat mengontrol pemberitaan yang dilakukan oleh pers, oleh karena itu pada masa awal Orde Baru, pers seakan mengalami kegembiraan besar terhadap suasana baru yang ada pada saat itu, setelah sebelumnya begitu terhambat oleh berbagai aksi represif, termasuk pembredelan⁸ yang dilakukan oleh penguasa pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa awal Orde Baru, banyak surat kabar yang juga sebelumnya sempat dibredel, diberi ijin terbit kembali, diantaranya adalah *Harian Nusantara* (Maret 1967), *Indonesia Raya* (Oktober 1968), *Pedoman* (November 1968), dan *Abadi* (Desember 1968).⁹

Mochtar Lubis, mantan pemimpin redaksi harian *Indonesia Raya* pada tahun 1978 memberikan sedikit gambarannya tentang keadaan pers pada saat itu, yang antara lain dikatakannya bahwa:

Tahun-tahun pertama "Orde Baru" membawa harapan bagi penemuan etosnya... Orientasi media massa kembali pada pemilihan umum, kepentingan rakyat, kepentingan si kecil dalam masyarakat, dan media masa memperjuangkan keadilan dan tegaknya hukum serta pula tegaknya hak-hak asasi manusia, kemuliaan martabat dan kebebasan manusia... Akan tetapi "bulan madu" hanya berlangsung beberapa tahun saja. Penguasa bertambah peka terhadap kritik dalam media massa...¹⁰

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa pada periode awal Orde Baru pers dan pemerintah mengalami masa *bulan madu*, dalam artian lain pers pada masa tersebut merasakan dan menikmati kebebasan yang sangat besar. Pada tahun-tahun berikutnya dimana format politik baru telah terbentuk dan kekuasaan pemerintah telah kokoh dan mantap, maka tindakan pemerintah terhadap pers pun berubah.

⁶ Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (Eds.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Jakarta: Aditya Media, 1999. Hlm. 30.

⁷ Akhmad Zaini Abar, *Op.Cit.*, Hlm. 77-88.

⁸ Istilah "Bredel" berasal dari kata Belanda yaitu *breidelen* yang artinya kekangan/mengekang, lihat S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000. Hlm. 106.

⁹ Abar. *Op.Cit.*, Hlm. 56

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 1-2

KISAH PEDOMAN: DARI IDEALISME SAMPAI *PERSONAL MANAGEMENT*

Dalam runtutan sejarahnya sendiri, pada awal terbitnya *Pedoman*, baik pada periode pertama maupun kedua situasi yang berkembang pada saat itu dipenuhi oleh semangat revolusioner dan kebebasan yang menggebu. Hal itu, jika pada periode pertama disebabkan oleh pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap Indonesia, sedangkan pada periode kedua disebabkan oleh tumbanganya Demokrasi Terpimpin, dan dimulainya rezim Orde Baru. Dengan demikian konsepsi dan visi *Pedoman* yang akan dijadikan acuan dalam menyajikan berita menjadi suatu hal yang cukup penting dalam menentukan perjalanan *Pedoman* dari masa ke masa.

Halaman muka Harian *Pedoman* pada awal tahun kedua terbit



(Sumber : Koleksi Langka Perpustakaan Nasional RI)

Dalam tajuk rencana *Pedoman* pada hari ulang tahunnya yang keenam pada tanggal 29 November 1954, yang berjudul *Laki-laki gigit anjing* dapat kita ketahui beberapa keterangan mengenai pendirian dan prinsip-prinsip kewartawanan dari surat kabar tersebut, terutama dari pemimpin redaksinya, yaitu:

Berpoloeh-poloeh tahoen jang lampau telah dikatakan bahwa toegas dan foengsi soerat kabar adalah to comfort the afflicted and to afflict the comfortable atoe dalam bahasa kita "menghiboer mereka jang sengsara dan mencamboek mereka jang keenakan".

Laki-laki dan perempoean jang mengasoeh soerat kabar ini percaya akan toegas dan foengsi soerat kabar seperti diseboetkan di atas, oleh karena masih banjak sekali di antara rakyat kita jang hidoep serba kekoerangan, tiada mendapat kesempatan boeat hidoep sebagai manoesia jang bermartabat, di dalam Indonesia Merdeka ini. Sebaliknja joega, makin nampak gejala tomboehnja segolongan kecil bangsa kita jang seperti kacang loepa di koelit, hidoep keenaakan, mewah secara menjolok mata di tengah-tengah kesengsaraan rakjat ... Terlaloeh banjak rakjat di doenia ini masih beloem mendapat kans untuk maju dan hidup berkecokoepan, hal mana sering diloepakan oleh soerat kabar jang telah memperoleh soekses dan menjadi kaya.

Laki-laki dan perempoean jang mengasuh soerat kabar ini akan mengingat senantiasaa akan keadaan jang diloekiskan diatas. Soerat kabar dikatakan orang adalah rancangan pertama dari sejarah. Dia mencatat bagaimana manusia hidoep, bergembira dan menderita dalam tiap-tiap babak penghidupannja.¹¹

¹¹ "Laki-laki gigit anjing." dalam tajuk rencana *Pedoman*, 29 November 1954. Mengenai tajuk rencana ini lihat juga Rosihan Anwar. *Menulis Dalam Air: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983 Hal. 175-177. Tajuk rencana tersebut sedikit banyak menggambarkan bagaimana idealitas yang dipegang oleh harian *Pedoman* dalam menjalani

Prinsip-prinsip yang secara tersirat mirip dengan perjuangan sosialisme tersebut menjadi amanat yang harus diemban bagi setiap wartawan yang bekerja di *Pedoman* serta Rosihan Anwar sebagai pemimpin surat kabar dalam melakukan tugas kewartawanan yang ada. Di sisi lain, setiap surat kabar atau harian tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan harian-harian lainnya, begitu pula halnya dengan *Pedoman*. Karakteristik itu bisa mencakup dalam beberapa hal seperti motto, ukuran kertas, gaya penulisan, gaya bahasa, isi pemberitaan, dan lain-lain. Pada masa periode pertama *Pedoman* memiliki motto, yakni "Suara Rakyat Merdeka"¹²

Foto Rosihan Anwar Pengampu Harian *Pedoman*



(Sumber : Koleksi Langka Perpustakaan Nasional RI)

Dalam prakteknya, Rosihan sendiri menerapkan gaya kepemimpinan yang dia sebut *Personal Management*¹³ dalam membesarkan *Pedoman*. Melalui kepemimpinannya tersebut, tirasnya terus meningkat. Bahkan pada 1961, memiliki tiras 53.000 eksemplar dan menjadikannya koran beroplak terbesar pada waktu itu¹⁴ Walaupun begitu, Rosihan tak menganggap *Pedoman* miliknya. Dalam tajuk untuk memperingati ulang tahun *Pedoman*, 28 November 1953¹⁵, Rosihan menegaskan bahwa sejarah pertumbuhan *Pedoman* tak pernah terikat kepada sejarah satu orang tapi senantiasa kepada sejarah suatu kumpulan orang. Semuanya tak terlepas dari usaha dan kerja keras dari para pengelola surat kabar tersebut. Sikap ini kemudian dia tunjukkan ketika membentuk PT

hari-harinya sebagai sebuah media ditengah masyarakat. Hal ini juga sedikit banyak mengidentikkan harian ini dengan sisi ideologis dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang memang merupakan *party directed* dari *Pedoman*.

¹² Motto ini sendiri tidak pernah berubah sampai dengan Periode kedua *Pedoman* (1968-1974) terbit dan berakhir, yakni ketika pembredelan pers Malari.

¹³ Budi Setiyono. "Bukan Rosihan Biasa." dalam *Majalah Pantau*, Maret 2001.

¹⁴ Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Rosihan Anwar dalam "Transkrip Wawancara Satu," pada <http://www.sepotongkue.com/home/?p=65> di unduh pada tanggal 29 Mei 2012, Jam 15.06.

¹⁵ *Pedoman*, 28 November 1953.

Badan Penerbit *Pedoman*¹⁶.

Pada awal Orde Baru, banyak dari koran-koran yang ketika pada masa Orde Lama dibredel, kemudian diperbolehkan untuk terbit kembali sebagai eksek dari pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. *Pedoman*, sebagai salah satu harian yang sempat dibredel pada masa Orde Lama, juga mendapat keuntungan dari kebijakan tersebut. Harian yang dipimpin oleh Rosihan Anwar ini akhirnya kembali terbit setelah sempat *vacuum* beberapa tahun akibat sikap yang represif dari Orde Lama.

Setelah beberapa tahun hubungan “manis” itu pun berakhir, setelah pemerintah mulai kokoh, pers mulai dianggap sebagai pengganggu stabilitas nasional, pemerintah pun mulai represif terhadap kebebasan pers yang ada. Hal ini tentunya berdampak luas kepada pers pada saat itu, tak terkecuali juga harian *Pedoman*, *Indonesia Raya*, dan *Abadi* yang kala itu terbit kembali pada periodenya yang kedua. Sikap represif pemerintah itu kemudian terealisasikan dengan peristiwa pembredelan massal pada awal bulan Januari akibat peristiwa huru-hara di awal bulan Januari 1974. Sehingga menyebabkan apa yang kemudian dinamakan sebagai dengan Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari).¹⁷

DARI SERUAN KOLOM HINGGA PEMBREDELAN: SUARA *PEDOMAN* MENGENAI KORUPSI 1969-1974

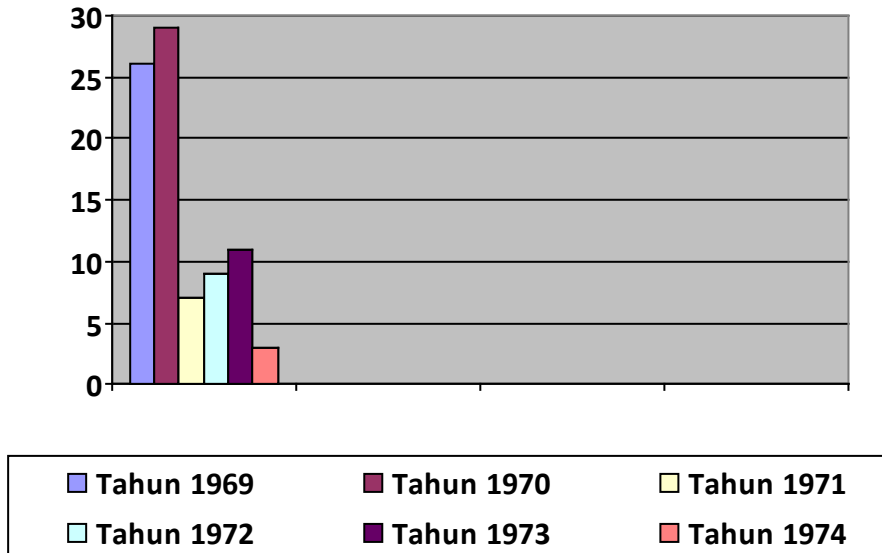
Selama periode kedua *Pedoman* (1969-1974) kasus korupsi yang diungkapkan menunjukkan arah yang dinamis, baik secara jumlah kasus maupun intensitas pemberitaannya. Pada periode ini, *Pedoman* lebih banyak menyoroti kasus korupsi di lembaga-lembaga dan program pemerintah seperti Bulog, Pertamina, Bea Cukai dan lain-lain. Berdasarkan intensitas pengungkapan korupsi *Pedoman* pada periode kedua 1969-1974, maka terlihat pengungkapan kasus korupsi terbagi menjadi dua bagian, yakni masa pengungkapan dan masa menunggu yang pada akhirnya berujung pada kekecewaan.

Hal ini didasarkan pada angka pengungkapan kasus korupsi yang mencapai puncaknya pada tahun 1970, kemudian tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 1971, 1972, 1973 terjadi fluktuasi dalam pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh *Pedoman*, walaupun secara kuantitas jumlahnya tidak sebesar pada tahun 1969-1970, yang kemudian menuju titik dasar pada tahun 1974 ketika harian tersebut dibredel.

¹⁶ PT Badan Penerbit *Pedoman* ini kemudian juga menerbitkan lampiran-lampiran yang dijual secara terpisah, yaitu *Pedoman Minggu*, *Pedoman Wanita*, *Pedoman Sport*, dan *Pedoman Anak*. Tiras mereka terbilang lumayan; masing-masing 42.000, 15.000, 40.000, dan 45.000 eksemplar pada 1961. Lihat, Budi Setiyono, *Loc.Cit.*,

¹⁷ Untuk lebih mendalami konsepsi dan banyak pola pemikiran mengenai Hal ini, coba lihat Akhmad Zaini Abar *1966-1974: Kisah Pers Indonesia*. Lkis, 1995. Ignatius Haryanto. *Pembredelan Pers di Indonesia: Kasus Koran Indonesia Raya*. LSPP, 1995. Raillon. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. LP3ES 1985; Lihat juga David T Hill. *Pers pada masa Orde Baru*. 2011.

Grafik Perbandingan Jumlah Pengungkapan Kasus Korupsi Harian *Pedoman* dalam Setiap Tahun (1969-1974)¹⁸



Pada periode-periode awal *Pedoman* terbit pada periode kedua (1969-1970), suasana euforia masih terasa didalam kehidupan pers pada masa awal Orde Baru, sehingga hal ini juga secara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap kuantitas tajuk rencana yang bertemakan ataupun berisi mengenai kata-kata korupsi di *Pedoman* tersebut. Hal ini juga terkait dengan rasa kefrustasian masyarakat dalam melihat sikap pemerintah dalam memberantas korupsi serta maraknya demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan anti korupsi di tahun-tahun ini.

Di sisi lain, dengan melihat gencarnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pers dan mahasiswa, pemerintah kemudian kembali mengakomodasi kembali harapan akan pemberantasan korupsi tersebut dengan membentuk suatu komisi yang dikenal dengan nama "Komisi Empat" yang melibatkan beberapa orang politikus tua yang kharismatis.

... Tidaklah perlu kiranya berpandjang-pandjang bahwa masalah memberantas korupsi teramat penting adanya, karena membiarkan adanya korupsi dan penjelewengan adalah sangat bertentangan dengan ide modernisasi ...

... Adanja sematjam " koalisi besar " antara kaum muda, para tjendekiawan, kaum tehnokrat dengan backing sepenuhnya dari pihak pers tentunja akan lebih menggairahkan kerdja komisi tersebut. Marilah setjara bersama kita telaah dimana sebenarnya letak " tumit achilles " segala korupsi itu.¹⁹

¹⁸ Grafik dibuat dan disusun sendiri melalui penelitian sumber oleh Penulis.

¹⁹ Halaman berita *Pedoman*, 3-4 Februari 1970, lihat juga halaman berita *Kompas*, 2 Februari 1970 yang isi-isi pemberitaannya mengenai bagaimana proses pembentukan komisi tersebut. *Pedoman* sendiri dengan semangat memberitakan bahwa ini merupakan suatu "angin segar" dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kebijakan pemerintah tersebut pada akhirnya membawa optimisme baru dalam pemerintah. *Pedoman* sendiri menyatakan dengan semangat dalam tajuk rencananya bahwa ini merupakan suatu kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan harian ini akan menyokong penuh usaha-usaha komisi empat tersebut dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.²⁰

Kasus-kasus korupsi dan kolusi pada masa-masa awal periode ini juga cenderung beragam dan berkutat pada masalah-masalah korupsi tingkat kakap, seperti Pertamina²¹, yang merupakan kasus korupsi yang cukup besar pada saat itu, *Pedoman* sendiri cukup gencar menanggapi kasus ini dengan melihat terutama sisi mismanajemen Pertamina sebagai suatu kelemahan terbesar dan jalan masuknya bagi korupsi-korupsi yang terjadi didalam tubuh perusahaan tersebut.²² BIMAS²³ juga merupakan kasus yang *Pedoman* banyak tuangkan dalam tajuk rencananya, Kasus LST dalam tahun-tahun ini juga banyak disorot oleh *Pedoman*²⁴, sehingga tak pelak membuat tajuk rencana yang ditulis *Pedoman* menjadi cenderung banyak dan meningkat.

Walaupun pada tahun 1970, pemberitaan pada tajuk rencana juga banyak disusupi oleh pemberitaan mengenai kasus PWI yang melibatkan Pemimpin Redaksi dari *Pedoman* sendiri yakni Rosihan Anwar, dengan B.M Diah yang merupakan pimpinan umum dari harian *Merdeka*. Kasus yang pada akhirnya membuat kepengurusan PWI menjadi terbelah dua ini juga sedikit banyak ikut mengisi kolom-kolom tema dari tajuk rencana di harian tersebut²⁵.

²⁰ "Semangat Berantas Korupsi", dalam tajuk rencana *Pedoman*, 6 Februari 1970. Dalam tajuk rencana ini, *Pedoman* secara positif menerima Komisi Empat sebagai suatu alat yang dikatakannya sebagai "tepat". Lebih lanjut lagi, dalam tajuk rencana ini *Pedoman* juga mencita-citakan suatu "koalisi besar" antara teknokrat, pers dan pemerintah dalam hal ini akan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

²¹ Perusahaan Pertamina terbentuk pada tahun 1968 yang merupakan gabungan dari tiga perusahaan antara lain Pertamina, Permina dan Permigran. Keterlibatan Ibnu Sutowo di bidang perminyakan sudah berlangsung sejak tahun 1957, ketika ia dipercaya untuk menduduki posisi Direktur Permina. Lihat Bruce Glassburner, "In the Wake Of General Ibnu: Crisis In The Indonesian Oil Industry" dalam *Asian Survey* Vol. XVI No. 12 November 1976.

²² Pertamina, Hasil Minyak dan Budget, dalam tajuk rencana *Pedoman* 11 Juni 1970. Dalam tajuk rencana ini, *Pedoman* secara gamblang mengupas bagaimana kelemahan-kelemahan Pertamina, dengan Ibnu Soetowo yang dalam hubungan ini membawa banyak "kerugian" bagi negara.

²³ Mengenai hal ini, lihat Alexis Rieffel. "The BIMAS Program for Self-Sufficiency in Rice Production", Indonesia. No. 8 (Oct 1969), *South East Asia Program Publication of Cornell University*. di unduh dari www.jstor.org/stable/3350671 tanggal 01/03/2012 Jam 23.04. *Pedoman* sendiri beberapa kali mengangkatnya dalam tajuk rencana, antara lain "Bimas, Petani dan Soal Kredit", dalam tajuk rencana *Pedoman*, 16 September 1969.

²⁴ Kasus LST atau *Landing Ship Tanks* adalah kasus korupsi pembelian kapal yang dilakukan oleh ABRI, proses transaksinya yang banyak kejanggalan-kejanggalan menjadi banyak sorotan pers pada saat itu. Diantaranya selain *Pedoman* (lihat tajuk rencananya tanggal 8 April 1969 yang berjudul "Soal Pembelian kapal LST oleh AD"), adalah *Nusantara* (lihat tajuk rencananya tanggal 7/4) dan *Indonesia Raya* (lihat tajuk rencananya tanggal 4/4 dengan judul "AD beli Besi Tua").

²⁵ Antara lain lihat tajuk-tajuk rencana harian *Pedoman* seperti tajuk rencana tanggal 17 Oktober 1970 yang berjudul "Disipilin Nasional pada pers kita" dan tajuk rencana tanggal 29 Oktober 1970 yang berjudul "ke arah " Pemberitaan Terpimpin " yang isi-isinya berkutat seputar protes dari harian *Pedoman* mengenai kongres PWI di Palembang pada saat itu yang dianggapnya banyak disusupi oleh "kepentingan-kepentingan" dan tidak obyektif.

Beranjak pada periode kesudahannya pada tahun 1971, *Pedoman* mulai mengalami masa penurunan dalam suaranya terhadap pemberantasan korupsi²⁶, hal ini didasarkan bahwa pada tahun 1971 kebanyakan permasalahan yang menjadi tema dan berada didalam tajuk-tajuk rencana *Pedoman* berkuat kepada pemilu pertama pada masa Orde Baru yang pada saat itu diselenggarakan dan menjadi pembicaraan dari banyak orang. *Pedoman* yang memang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan pers yang *party directed* dari PSI, menginginkan adanya suatu revitalisasi dari partai politik tersebut dalam pemilu pertama dalam kehidupan masyarakat pada masa awal Orde Baru, yang pada akhirnya berbuah pahit, karena usulan tersebut tidak dikabulkan oleh pemerintah pada saat itu, yang lebih memilih merevitalisasi wadah dari kalangan muslim reformis dengan mengizinkan partai Parmusi lahir²⁷.

Sedangkan pada tahun 1972 dan 1973, permasalahan kebanyakan diarahkan pada masalah percukongan dan modal asing dan masalah-masalah korupsi yang sebelumnya sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi belum diusut secara menyeluruh, seperti kasus Bulog²⁸ yang kemudian *Pedoman* kritik dalam tajuk rencananya sebagai suatu bentuk korupsi yang kasatmata dan sulit ditembus.

Analisis *Pedoman* tersebut nampaknya beralasan, karena sejak dijalkannya Bulog pada masa awal Orde Baru sampai dengan sekarang, kasus korupsi seakan-akan sulit ditelaah dan seakan menemui jalan buntu.

... "Image " atau gambaran diri BULOG jadi rusak, begitu juga " image " itu komisi-komisi DPR tidak ketulungan, dan buat apa semua ini? Sedangkan duduk perkara yang sebenarnya atau kalau mau bilang secara kren-gagah " the root of evil" (akar semua kejahatan) toh kagak kebongkar segala sesuatu tetap begitu saja. Apakah kita mesti berkecil hati dibuatnya melihat "skenario" Rachmad-Achmad ini? ²⁹.

²⁶ Lihat Lampiran-Lampiran. hal ini didasarkan bahwa pada tahun 1971 kebanyakan permasalahan yang menjadi tema dan berada didalam tajuk-tajuk rencana *Pedoman* berkuat kepada pemilu pertama pada masa Orde Baru yang pada saat itu diselenggarakan dan menjadi pembicaraan dari banyak orang.

²⁷ Mengenai hal ini lihat Francois Raillon. *Op.Cit.*, Hal. 77.

²⁸ Sejarah mengenai Bulog dapat ditelusuri semenjak dibentuknya Yayasan BAMA pada tahun 1950 yang bertugas melakukan kebijakan penetapan harga beras, inspeksi pasar, pemasukan dan lain-lain. Pada masa Orde Lama banyak dibentuk badan-badan beras seperti Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) yang bertugas mengimpor beras, Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) bertugas menyerap produk domestik dan Dewan Bahan Makanan (DBM), karena badan-badan ini dianggap tidak berhasil mengelola masalah beras maka badan-badan tersebut disatukan menjadi BPUP. Pada masa Orde Baru BPUP diganti menjadi Kolognas (Komando Logistik Nasional) melalui keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 87/1966, kemudian pada tahun 1967 terjadi krisis beras, maka Kolognas diubah menjadi Bulog berdasarkan Kepres No. 272/1967. Lihat, Bustanul Arifin, *Bustanul Arifin 70 Tahun: Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru* Cet. I. Jakarta: Sinar Harapan, 1995, Hal. 89-96.

²⁹ "Soal DPR dan BULOG, koq kesudahannya begini aje, bang?"; dalam tajuk rencana *Pedoman*, 23 November 1972. Disini terlihat sekali *Pedoman* berusaha untuk menjelaskan bagaimana Bulog sebagai sebuah badan logistik mempunyai "image" yang buruk dimata masyarakat akibat berbagai kasus korupsi yang mendera badan tersebut. Di sisi lain, *Pedoman* juga berujar bahwa sistem tender yang tidak transparan juga turut andil dalam menyebabkan korupsi di Bulog tersebut.

Walaupun begitu, *Pedoman* tetap tidak putus asa dalam memberitakan kasus-korupsi yang ada di pemerintahan. Dalam hal ini, *Pedoman* dikuatkan oleh tekad yang semakin menguat untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam birokrasi pemerintahan sebagai sarana untuk memperbaiki kebudayaan yang dikatakannya sudah identik dengan korupsi.³⁰

Jika ditilik, kasus-kasus korupsi yang diangkat dari segi kuantitas mengalami peningkatan terutama pada tahun 1973, akan tetapi kembali menurun dengan drastis pada tahun 1974, bersamaan dengan peristiwa pembredelan yang menimpa pada harian ini. Walaupun begitu, pada tahun-tahun terakhir *Pedoman* terbit tersebut *Pedoman* juga masih sempat bersuara terhadap keadaan waktu itu yang digambarkan panas dan penuh dengan tuntutan akan keadilan sosial dan perbaikan pembangunan. *Pedoman* dalam beberapa tajuk rencananya banyak menyoroti beberapa hal mengenai masalah peranan cukong dalam hubungannya dengan modal asing dan Jepang.

*"... Kalau kita perhatikan kritik2 dari kalangan masyarakat belakangan ini, suara yang diperdengarkan melalui aksi2 demonstrasi mahasiswa, diskusi2 di mimbar universitas, ulasan2 dalam pers, pendapat yang dikemukakan oleh Bung Hatta mengenai membangun ekonomi berdasarkan isi dan semangat UUD'45 ... Dalam hal demikian, maka seharusnya bekerja dengan sistim cukong itu dihentikan. Maka kita harapkan, supaya apabila PM Tanaka berbicara dengan pengusaha-pengusaha Jepang disini, aspek itu disinggungnya ..."*³¹

Harian ini berpendapat bahwa sudah seharusnya sistem cukong-cukong modal itu dihentikan, karena tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat dan amat merugikan negara. *Pedoman* juga dalam hal ini menyoroti jaksa agung yang dikatakan kurang tegas dalam memberangus cukong-cukong yang ada didalam pemerintahan.

Di sisi lain, yang menjadi menarik dari suara-suara yang diungkapkan oleh *Pedoman* ini adalah bahwa kasus-kasus korupsi yang diungkap dan dikupas serta dijadikan bahan renungan tidak hanya berkisar dari kasus-kasus korupsi yang berskala besar atau dikatakan "kakap" seperti kasus Pertamina, dan Bulog, akan tetapi juga menjalar sampai dengan kasus-kasus korupsi yang bisa dikatakan kecil atau "teri" pada saat itu, yakni seperti korupsi "bahan pakaian" ataupun korupsi yang bisa dikatakan remeh-temeh oleh khalayak ramai, akan tetapi penting dalam kacamata *Pedoman* yang

³⁰ "Bagaimana Mengatasi Korupsi di Indonesia?", dalam tajuk rencana *Pedoman*, 21 Desember 1972. Dalam hal ini *Pedoman* banyak berujar dengan memberikan beberapa solusi agar pemberantasan korupsi dapat dijalankan sampai keakar-akarnya, sehingga dapat memutus tali kebudayaan korupsi yang selama ini bergumul di Indonesia.

³¹ Diantara tajuk rencana yang diangkat oleh *Pedoman* ini antara lain ialah "Jaksa Agung agar menindak Cukong-Cukong", dalam tajuk rencana *Pedoman*, 7 Januari 1974 dan Hubungan Cukong dengan Pejabat dan Jepang", dalam tajuk rencana *Pedoman*, 16 Januari 1974. Dalam beberapa penelusuran kata lebih lanjut, memang terlihat tanggapan *Pedoman* mengenai cukong-cukong tersebut erat kaitannya dengan konsepsi harian tersebut yang sejalan kebijakan sosialisme dalam lingkup ekonomi, yang kebanyakan sesuai dengan usaha kaum proteksionis dalam melakukan perlawanan terhadap banyaknya modal-modal asing yang masuk pada saat itu.

kemudian menuliskan menjadi sebuah tajuk, yakni mengenai persoalan “uang tilang” di jalanan.

“ ... Sistem prit djigo, tentu masih lebih cepat daripada 6 jam urusannya. Pihak-pihak yang kurang mementingkan disiplin dan yang hanya memikirkan urusannya supaya lekas beres saja, tentu akan mencari jalan yang tepat saja ... Hal ini tidak disebabkan oleh mental petugas pelaksana tentunya, tetapi juga disebabkan mental pihak umum yang ingin cepat soalnya selesai, membiarkan mental petugas bertambah rusak.”³²

Alhasil, mulai dari seruan-seruan mengenai pemberantasan korupsi, sampai dengan ungkapan-ungkapan kekecewaan mengenai kasus korupsi di Indonesia. Berbagai gambaran tersebut terangkum didalam tajuk-tajuk rencana *Pedoman* semasa harian ini terbit pada periode kedua, yakni pada tahun 1969-1974.

Halaman depan Harian *Pedoman* (tanggal 16 Januari 1974) tatkala menyiarkan pemberitaan mengenai Peristiwa Malari.



(Sumber : Koleksi Langka Perpustakaan Nasional RI)

Mengenai bagaimana *Pedoman* pada akhirnya dibredel, hal ini berkaitan dengan suara-suara yang dikeluarkannya pada tahun-tahun awal Orde Baru tersebut. Hal ini karena pers pada masa tersebut dikatakan oleh pemerintah telah:

³² Hal ini kemudian dapat dilihat dan terangkum dalam tajuk rencana-tajuk rencana yang berjudul “Zuster Makassar memakai Rok Mini”, dalam tajuk rencana *Pedoman*, 1 Desember 1969 dan “Sistem Tilang dan Prit Djigo”, dalam tajuk rencana *Pedoman*, 13 Januari 1971. Hal ini menandakan bahwa memang *Pedoman* tidak mengkhususkan hariannya untuk permasalahan korupsi yang dikatakan besar pada waktu itu, akan tetapi juga mengenai kasus-kasus korupsi yang pada saat itu menggejala hampir disemua segi dan strata masyarakat, sehingga dapat dikatakan *Pedoman* dalam hal ini cukup “jeli” dalam melihat permasalahan korupsi pada masanya tersebut.

“...memuat tulisan-tulisan yang dapat merusak kewibawaan dan kepercayaan kepemimpinan nasional dan dianggap menghasut rakyat, sehingga membuka peluang yang dapat mematangkan/memperuncing situasi ke arah terjadinya kekacauan seperti pada tanggal 15 dan 16 Januari 1974 dan yang dapat mengadu domba antara pimpinan yang satu dengan yang lain... khusus untuk harian Pedoman, surat kabar ini dalam edisi 12 Januari telah memuat pernyataan para Mahasiswa IKIP yang antara lain menyangkut hubungan Ny. Tien Soeharto dengan berbagai perusahaan.”³³

Hal itulah yang pada akhirnya membuat *Pedoman* terkena pembredelan pada masa tersebut. Rosihan menuliskan dengan pahit peristiwa pembredelan pada periode kedua tersebut dalam otobiografinya sebagai berikut:

“... ketika pemerintah memutuskan mencabut izin terbitnya harian *Pedoman* setelah terjadi peristiwa “Malari” tanggal 15-16 Januari 1974, justru di saat-saat surat kabar itu mulai lepas landas dan oplahnya meningkat menjadi 60.000 eksemplar serta prospeknya buat masa mendatang tampak akan cerah, maka tindakan itu tiada lain tiada bukan mencabut nyawa orang untuk selama-lamanya.”³⁴

Jika kita mau menilik lebih dalam, dari beberapa kutipan tajuk-tajuk rencana tersebut, kita dapat melihat bagaimana *Pedoman* menjalani kehidupannya pada masa awal tersebut dengan suatu pengharapan dan idealisme bagi pemberantasan korupsi yang lebih baik. Walaupun pada akhirnya itu semua berakhir dengan pembredelan terkait peristiwa Malari pada tahun 1974, yang pada akhirnya membuat eksistensi pers yang ada menjadi memudar atau dipudarkan.

KESIMPULAN

Peranan *Pedoman* dalam mengungkap kasus korupsi hanya salah satu fenomena dari banyak ragam dan peristiwa dalam kehidupan pers pada masa awal Orde Baru. Masa-masa ini ditandai dengan euforia kebebasan pers yang sempat tersumbat karena perilaku represif dari pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin, masa ini juga ditandai dengan banyaknya pemberitaan yang lugas, langsung menuju titik sasaran, dan tanpa *tedeng aling-aling*. Di masa itu pula, korupsi yang merupakan salah satu penyakit “lama” dari kebudayaan dan masyarakat Indonesia kembali berkembang biak dan subur dikalangan pemerintahan. Tak pelak hal ini mendapat sorotan-sorotan tajam dari beberapa pers yang pada saat itu dikenal kritis dan sempat terbit kembali pada masa awal Orde Baru setelah pemerintahan Demokrasi Terpimpin tumbang, seperti *Indonesia Raya*, *Nusantara*, *Abadi*, dan *Pedoman* sendiri.

Suatu penelusuran yang menarik dan pada akhirnya menjadi pembahasan adalah

³³ Tribuana Said (Peny.), *H. Rosihan Anwar, Wartawan dengan Aneka Citra*. Jakarta : Kompas, 1992, Hal. 49-50.

³⁴ Rosihan Anwar. *Op.Cit.*, Hal. 264.

bagaimana sorotan-sorotan mengenai kasus korupsi ini tidak hanya ditampilkan lewat pemberitaan-pemberitaan di halaman depan saja, akan tetapi juga lewat kolom-kolom lain, seperti karikatur, pojok, dan juga kolom editorial atau biasa disebut sebagai tajuk rencana. Tajuk rencana sendiri yang menjadi bahan analisis dalam studi sejarah kali ini menggambarkan bagaimana suatu kasus korupsi tersebut tidak hanya dapat dikupas lewat pemberitaan-pemberitaan yang akan cepat dan sekedar "lewat", sehingga cepat juga hilang dalam ingatan masyarakat ramai, akan tetapi layak untuk direnungkan dan menjadi refleksi dari permasalahan bangsa yang ada pada saat itu.

DAFTAR ACUAN

KORAN DAN MAJALAH

Pedoman Tahun 1950, 1953, 1954, 1960, 1969 – 1974

ARTIKEL DAN JURNAL

Anwar, Rosihan. "Transkrip Wawancara Satu," Dalam <http://www.sepotongkue.com/home/?p=65> di unduh pada tanggal 29 Mei 2012, Jam 15.06.

Feith, Herbert. "Soeharto Search for a Political Format", Indonesia. No. 6 (Oct 1968), *South East Asia Program Publication of Cornell University*. di unduh dari www.jstor.org/stable/3350713 tanggal 01/03/2012 Jam 22:59

Glassburner, Bruce. "In the Wake Of General Ibnu: Crisis In The Indonesian Oil Industry" dalam *Asian Survey* Vol. XVI No. 12 November 1976.

Hindley, Donald. "Indonesia 1971: Pantjasila Democracy and the Second Parliamentary Elections", *Asian Survey*, Vol. 12, No. 1, A Survey of Asia in 1971: Part I (Jan., 1972). *University of California Press*. di unduh dari <http://www.jstor.org/stable/2642920> tanggal 20/05/2011 Jam 11:36

Rieffel, Alexis. "The BIMAS Program for Self-Sufficiency in Rice Production", Indonesia. No. 8 (Oct 1969), *South East Asia Program Publication of Cornell University*. di unduh dari www.jstor.org/stable/3350671 tanggal 01/03/2012 Jam 23.04

Setiyono, Budi. "Bukan Rosihan Biasa." dalam *Majalah Pantau*, Maret 2001.

BUKU

Abar, Akhmad Zaini. *1966-1974 : Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta : Lkis, 1995.

Anwar, Rosihan. *Menulis Dalam Air: Sebuah Otobiografi*. Jakarta : Sinar Harapan, 1983.

Arifin, Bustanul. *Bustanul Arifin 70 Tahun: Beras, Koperasi dan Politik Orde Baru* Cet. I. Jakarta: Sinar Harapan, 1995

Arifin, Marzuki. *Fakta Analisa Lengkap dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Publishing House Indonesia. 1974.

Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1986.

Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (Eds.) *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Jakarta: Aditya Media. 1999.

Haryanto, Ignatius. *Pembredelan Pers di Indonesia: Kasus Koran Indonesia Raya*. LSPP, 1995.

Hill, David T. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta :. Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan LSPP, 2011.

Raillon, Francois. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Said, Tribuana (Peny). *H. Rosihan Anwar, Wartawan dengan Aneka Citra*. Jakarta : Kompas, 1992.

KARYA LEKSIKOGRAFIS DAN LAIN-LAIN

Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.